BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Adi (2007) dalam Harianto menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nanga (2005) dalam Harianto dan Adi (2007) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bisa jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah ini memunculkan tuntutan yang semakin kuat untuk mengubah struktur belanja, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim dalam Adi, 2007). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) (Harianto dan Priyo, 2007). Holtz-Eakin *et al.* (1994) dalam Harianto dan Adi (2007) menemukan adanya keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Studi yang dilakukan Legrenzi & Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2003) menemukan bukti empiris bahwasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hasil penelitian ini diperkuat oleh temuan Susilo dan Adi (2005) dalam Harianto dan Adi (2007) yang menyimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), menyimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja (Abdullah dan Halim, 2006). Secara empiris juga ditemukan adanya *flypaper effect* dalam hubungan antara pendapatan dan belanja (Moisio, 2001 dalam Abdullah dan Halim, 2006). yang menyatakan bahwa orang akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan

PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya dalam pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim (2001); Abdullah dan Asmara (2006) dalam Abdullah dan Halim, 2006).

Penelitian yang dilakukan Abdullah dan Halim (2003) menemukan bahwa pendapatan daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan.

Persyaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002 dalam Harianto dan Adi, 2007). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan

perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel indevenden	Variabel dependen	Hasil	Studi empiris
1.	Raden irfan suryawan (2007)	Belanja pegawai,belanja barang dan jasa,belanja modal	PAD	Ketiga belanja berpengaruh positif terhadap PAD	Pemda dengan kemampuan rendah se jawa bali
2.	Dimas aditya putra (2010)	Belanja pegawai,belanja barang dan jasa,belanja modal	PAD	Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap PAD.dan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap PAD	Pemda dengan kemampuan tinggi,sedang,rendah se Indonesia
3.	Adi (2007)	Pertumbuhan ekonomi daerah,belanja pembangunan	PAD	Belanja pembangunan daerah berdampak positif dan signifikan terhadap,pertumbuhan ekonomi, Belanja pembangunan daerah mempunyai dampak yang positif dan signifikan PAD, Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positit terhadap PAD dinyatakan diterima.	Pemda se jawa bali

Penelitian tentang belanja daerah berpengaruh terhadap PAD juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti penelitian Adi (2007) yang menunjukan adanya pengaruh positif belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal terhadap PAD pemerintah se-Jawa Bali, demikian juga yang dilakukan oleh Putra (2010), yang menyimpulkan hasil

dan jasa terhadap PAD, namun disini belanja modal berpengaruh negatif terhadap PAD, pada Pemda dengan kemampuan tinggi, sedang, rendah se-Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Yuda (2011) yang menyatakan adanya hubungan positif signifikan kedua belanja yaitu belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap Petumbuhan Ekonomi melalui PAD se-Indonesia

Dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel Independen DAU (Dana Alokasi Umum), DAU (Dana Alokasi Umum) digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiscal disuatu daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Harianto dan Adi (2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak dilakukan analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Memandang pentingnya peran dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah pada era otonomi daerah ini, serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi" (Studi Empiris**

4. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
5. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
6. Untuk mengetahaui apakah DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal?
7. Untuk mengetahui apakah PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal?

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang teoritis
   A. Menambah pemahaman tentang pemda khususnya yang berkaitan dengan Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah belanja daerah, dan Pertumbuhan ekonomi.
   B. Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berbasis pemda khususnya Bidang Praktik Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan Pertumbuhan ekonomi.
2. Bidang Praktik
   A. Diharapakan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah